



**REVIU  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
2015 - 2019**

**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA  
SE-PROVINSI RIAU RIAU**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI RIAU**





**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU  
NOMOR 008 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU  
NOMOR 071 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU,**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja yang dapat mengukur data berkualitas, maka perlu membuat Keputusan Kepala BPS Provinsi Riau Nomor 008 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Nomor 071 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.
- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
  7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;



11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 643);
12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2013;
13. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPS PROVINSI RIAU NOMOR 008 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU NOMOR 071 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU

#### Pasal 1

Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Nomor 071 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.

#### Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau setelah perubahan secara lengkap sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 25 Januari 2016

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI RIAU  
  
MAWARDI ARSAD

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU**  
**NOMOR 008 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU**  
**NOMOR 071 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BPS PROVINSI RIAU**

1. Nama Unit Organisasi : **BPS Provinsi Riau**
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Fungsi :
  - a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik;
  - b. Penyelenggaraan statistik dasar;
  - c. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas BPS;
  - d. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik;
  - e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tataaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.
4. Indikator Kinerja Utama :

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Kualitas data statistik	1.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Bidang Distribusi Bidang Sosial Bidang Nerwillis Bidang Produksi	Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen

No. (1)	Tujuan dan Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Penanggung Jawab (4)	Sumber Data (5)
1.1	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	<p>1.1.a Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik</p> <p>1.1.b. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama</p> <p>1.1.c. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS</p> <p>1.1.d Jumlah Release Data yang tepat waktu</p> <p>1.1.e Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu</p> <p>1.1.f Jumlah publikasi /laporan sensus yang terbit tepat waktu</p>	<p>Bidang Distribusi Bidang Sosial Bidang Nerwilis Bidang Produksi</p> <p>Bidang Distribusi Bidang Sosial Bidang Nerwilis Bidang Produksi</p> <p>Bidang IPDS</p> <p>Bidang Distribusi Bidang Sosial Bidang Nerwilis Bidang Produksi</p> <p>Bidang Distribusi Bidang Sosial Bidang Nerwilis Bidang Produksi Bidang IPDS</p> <p>Bidang Distribusi Bidang Sosial Bidang Nerwilis Bidang Produksi Bidang IPDS</p>	<p>Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen</p> <p>Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen</p> <p>Sistem Informasi Master File Desa dan Master Blok Sensus</p> <p>Laporan Kegiatan BPS Provinsi</p> <p>Laporan Kegiatan BPS Provinsi</p> <p>Laporan Kegiatan BPS Provinsi</p>

No. (1)	Tujuan dan Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Penanggung Jawab (4)	Sumber Data (5)
1.2	Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)	<p>1.2.a. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga</p> <p>1.2.b. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah usaha</p> <p>1.2.c. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha</p>	<p>Bidang Distribusi Bidang Sosial Bidang Nerwalis Bidang Produksi</p> <p>Bidang Distribusi Bidang Sosial Bidang Nerwalis Bidang Produksi</p> <p>Bidang Distribusi Bidang Sosial Bidang Nerwalis Bidang Produksi Bidang IPDS</p>	<p>Laporan Kegiatan BPS Provinsi</p> <p>Laporan Kegiatan BPS Provinsi</p> <p>Laporan Kegiatan BPS Provinsi</p>
2.	Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	2.a. Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Bidang IPDS	Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen
2.1	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)	<p>2.1.a. Persentase Kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS</p> <p>2.1.b. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses</p>	<p>Bidang IPDS</p> <p>Bidang IPDS</p>	<p>Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen</p> <p>Website BPS Provinsi</p>

No. (1)	Tujuan dan Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Penanggung Jawab (4)	Sumber Data (5)
		<p>data dan informasi statistik melalui website BPS</p> <p>2.1.c. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional</p> <p>2.1.d. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS</p> <p>2.1.e. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS</p>	<p>Bidang IPDS</p> <p>Bagian Tata Usaha</p> <p>Bagian IPDS</p>	<p>Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen</p> <p>Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen</p> <p>Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen</p>

No. (1)	Tujuan dan Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Penanggung Jawab (4)	Sumber Data (5)
3.	Peningkatan birokrasi yang akuntabel	3.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bagian Tata Usaha	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Oleh Inspektorat
3.1	Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	3.1.a. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu 3.1.b. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata	Bagian Tata Usaha  Bagian Tata Usaha	Sistem Informasi Kepegawaian  Sistem Informasi Kepegawaian
3.2	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	3.2.a. Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat	Bidang Distribusi Bidang Sosial Bidang Nerwalis Bidang Produksi Bidang IPDS	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Oleh Inspektorat



**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU**  
**NOMOR 008 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU**  
**NOMOR 071 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA**

1. Nama Unit Organisasi : **BPS Kabupaten/Kota**
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Fungsi :
  - a. Penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten/Kota;
  - b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten/Kota;
  - c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di Bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kabupaten/Kota.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Penanggung Jawab (4)	Sumber Data (5)
1	Peningkatan Kualitas data statistik	1.a Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data	Seksi Distribusi Seksi Sosial Seksi Nerwilis Seksi Produksi	Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen

No. (1)	Tujuan dan Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Penanggung Jawab (4)	Sumber Data (5)
1.1	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	<p>1.1.a Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik</p> <p>1.1.b. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama</p> <p>1.1.c. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS</p> <p>1.1.d Jumlah publikasi /laporan statistik yang terbit tepat waktu</p> <p>1.1.e Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu</p>	<p>Seksi Distribusi Seksi Sosial Seksi Nerwilis Seksi Produksi</p> <p>Seksi Distribusi Seksi Sosial Seksi Nerwilis Seksi Produksi</p> <p>Seksi IPDS</p> <p>Seksi Distribusi Seksi Sosial Seksi Nerwilis Seksi Produksi Seksi IPDS</p> <p>Seksi Distribusi Seksi Sosial Seksi Nerwilis Seksi Produksi Seksi IPDS</p> <p>Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik</p>	<p>Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen</p> <p>Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen</p> <p>Sistem Informasi Master File Desa dan Master Blok Sensus</p> <p>Laporan Kegiatan BPS Kabupaten/Kota</p> <p>Laporan Kegiatan BPS Kabupaten/Kota</p>

No. (1)	Tujuan dan Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Penanggung Jawab (4)	Sumber Data (5)
1.2	Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)	<p>1.2.a. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga</p> <p>1.2.b. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah usaha</p> <p>1.2.c. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha</p>	<p>Seksi Distribusi Seksi Sosial Seksi Nerwillis Seksi Produksi</p> <p>Seksi Distribusi Seksi Sosial Seksi Nerwillis Seksi Produksi</p> <p>Seksi Distribusi Seksi Sosial Seksi Nerwillis Seksi Produksi</p>	<p>Laporan Kegiatan BPS Provinsi</p> <p>Laporan Kegiatan BPS Provinsi</p> <p>Laporan Kegiatan BPS Provinsi</p>
2.	Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	2. a Persentase Kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Seksi IPDS	Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen
2.1	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)	<p>2.1.a. Persentase Kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS</p> <p>2.1.b. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS</p>	<p>Seksi IPDS</p> <p>Seksi IPDS</p>	<p>Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen Website BPS Kabupaten/Kota</p>



No. (1)	Tujuan dan Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Penanggung Jawab (4)	Sumber Data (5)
		<p>2.1.c. Persentase Kementerian/Lembaga yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional</p> <p>2.1.d. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS</p> <p>2.1.e. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS</p>	<p>Seksi IPDS</p> <p>Seksi Tata Usaha</p> <p>Seksi IPDS</p>	<p>Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen</p> <p>Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen</p> <p>Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen</p>
3.	Peningkatan birokrasi yang akuntabel	3.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	<p>Seksi Distribusi</p> <p>Seksi Sosial</p> <p>Seksi Nerwalis</p> <p>Seksi Produksi</p> <p>Seksi IPDS</p> <p>Subbagian Tata Usaha</p> <p>Subbagian Tata Usaha</p>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Oleh Inspektorat
3.1	Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	<p>3.1.a. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu</p> <p>3.1.b. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I</p>	<p>Subbagian Tata Usaha</p>	<p>Sistem Informasi Kepegawaian</p> <p>Sistem Informasi Kepegawaian</p>

No. (1)	Tujuan dan Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Penanggung Jawab (4)	Sumber Data (5)
3.2	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	3.2.a. Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat	Seksi Distribusi Seksi Sosial Seksi Nerwalis Seksi Produksi Seksi IPDS	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Oleh Inspektorat

KEPALA BPS PROVINSI RIAU,



MAWARDI ARSAD

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI RIAU**

Jl. Pattimura No. 12, Pekanbaru, 28131  
Telp. (0761) 23042 Fax. (0761) 21336  
Homepage: <http://riau.bps.go.id> Email: [bps1400@bps.go.id](mailto:bps1400@bps.go.id)